



PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA DARI HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Rika Kartika¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: rikakartika.binabangsa@gmail.com¹

Abstract

This research examines the facts about the implementation of Indonesia's fiscal and monetary policies and the obstacles. This literature research aims to compile and describe policy enforcement. The research was carried out using the type of library research. In this research, we use a qualitative approach which aims to examine existing social phenomena in more depth. This research uses reference books and journal articles related to the discussion in this journal.

The Government & Bank Indonesia work together in creating fiscal and monetary policies that influence inflation, financial stability, or increase economic growth. State income or expenditure regulated in the APBN Law, and tax regulations to increase state revenues are part of the fiscal policy running in Indonesia. On the other hand, the Indonesian Central Bank implements monetary policy in Indonesia against the background of low interest rates and stable rupiah exchange rates. However, there are several limitations to the effective implementation of Indonesia's fiscal and monetary policies, and inequality in the MSME sector remains limited, which hinders its role in enhancing economic growth and providing job vacancies. and the lack of public education and financial literacy which hampers the transmission of Bank Indonesia's monetary policy to the real sector.

Key words: Fiscal, Monetary, Policy

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Fakta implementasi Kebijakan fiskal dan Moneter Indonesia dan kendalanya. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menyusun dan mendeskripsikan Tentang penegakan kebijakan. penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial yang ada secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan buku referensi dan artikel jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam jurnal ini.

Pemerintah & Bank Indonesia bekerja sama dalam menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi inflasi, stabilitas keuangan, atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan atau belanja negara yang diatur dalam Undang-Undang APBN, dan regulasi perpajakan untuk menaikkan penerimaan negara adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berjalan di Indonesia. Sebaliknya, Bank Sentral Indonesia menerapkan di Indonesia terkait kebijakan moneter dengan latar belakang suku bunga yang rendah dan kestabilan nilai tukar rupiah. Namun, terdapat beberapa pembatasan terhadap penerapan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia yang efektif, dan ketimpangan di sektor UMKM tetap terbatas, yang menghambat perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lowongan kerja. serta Kurangnya edukasi dan literasi keuangan masyarakat yang menghambat transmisi Kebijakan moneter Bank Indonesia ke sektor riil.

Kata kunci: Fiskal, Moneter, Kebijakan

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia telah melalui berbagai fase perkembangan, mulai dari era kolonial hingga menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Selama beberapa dekade terakhir, kebijakan fiskal dan moneter memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal mencakup pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara yang

bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas harga, yang bertujuan untuk menjaga inflasi dalam batas yang wajar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan utama dalam kebijakan fiskal adalah keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini diperparah oleh inefisiensi pengelolaan anggaran dan kebocoran dalam sistem keuangan negara. Di sisi lain, kebijakan moneter sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan perubahan kondisi ekonomi global juga memberikan tekanan tambahan terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

Upaya penanggulangan hambatan dalam kebijakan fiskal dan moneter menjadi fokus utama pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Dalam bidang fiskal, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Sementara itu, dalam bidang moneter, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter utama telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Penetapan suku bunga acuan yang responsif terhadap kondisi ekonomi domestik dan global menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter. Selain itu, BI juga aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan negara-negara lain juga dilakukan untuk memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Tahun 2024 menjadi tahun krusial bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, terdapat peluang untuk pemulihan ekonomi yang didorong oleh stabilitas domestik dan potensi pelonggaran kebijakan moneter. Di sisi lain, berbagai tantangan global dan domestik seperti inflasi global, geopolitik, dan dinamika tahun politik harus dihadapi dengan cermat. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menunjukkan langkah yang tepat dalam menerapkan kebijakan fiskal dan moneter di tahun 2024. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja aktif pemerintah, pengurangan defisit anggaran, dan peningkatan penerimaan pajak merupakan langkah konkret untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh. Misalnya, pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi

dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan basis penerimaan negara tanpa memberatkan masyarakat.

Di sisi moneter, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Suku bunga yang rendah dan nilai tukar rupiah yang stabil diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman bank, yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang berhasil adalah yang mampu memberikan dampak positif terhadap variabel-variabel makroekonomi seperti suku bunga, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan inflasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyu Yuliani dan rekannya (2024) menemukan bahwa variabel-variabel ini sangat terkait dengan kebijakan moneter dan memainkan peran kunci dalam menentukan stabilitas ekonomi.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Inflasi global yang dipicu oleh gangguan rantai pasok dan ketegangan geopolitik dapat memberikan tekanan terhadap harga-harga domestik. Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang memanas menjelang tahun pemilu juga menambah ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting. Kebijakan fiskal yang proaktif perlu didukung oleh kebijakan moneter yang adaptif untuk menjaga keseimbangan ekonomi. (Ridwan, Ihsan. 2021).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk menanggulangnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam konteks masalah yang dihadapi, terdapat dua pertanyaan penelitian yang muncul, yaitu implementasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial mengingat pentingnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidaklah sedikit, mengingat dinamika ekonomi yang kompleks serta adanya kendala-kendala struktural yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap implementasi dan kendala dalam kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi negara dan menemukan solusi yang tepat guna memperbaiki kondisi perekonomian yang terdampak.

TINJAUAN PUSTAKA

RUU APBN Tahun 2024

Pada awal tahun 2023, Indonesia mengalami proses pemulihan ekonomi yang kuat setelah pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2022. Keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut, serta status pandemi di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023,

memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian domestik dalam tiga bulan pertama tahun tersebut. Aktivitas ekonomi kembali pulih ke kondisi sebelum pandemi, yang merupakan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi pascapandemi. Dengan pencabutan status pandemi COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 5 Mei 2023, prospek pemulihan ekonomi global juga semakin diperkuat. Meskipun demikian, risiko global tetap tinggi karena inflasi di negara maju masih di atas target jangka menengah dan suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Pengetatan moneter di negara maju juga memberikan beban tambahan pada hutang negara-negara berkembang, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi global.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di beberapa negara pada kuartal tersebut mungkin sekuat di Amerika Serikat dan China, Eropa masih menunjukkan tanda-tanda kontraksi. Indikator baru seperti PMI Manufaktur dan perdagangan internasional menunjukkan bahwa situasi di zona kontraksi belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kendati terjadi pemulihan ekonomi, tantangan ekonomi global masih belum teratasi sepenuhnya, dan diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi risiko yang masih ada.

Indonesia mempertahankan stabilitas ekonomi meski terdapat tekanan global. Inflasi moderat, dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% di Desember, serta surplus perdagangan selama 38 tahun. Konsolidasi fiskal tercapai lebih awal dari target, memungkinkan reformasi struktural. Kebijakan APBN 2024 menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja pemerintah, dan pembiayaan yang prudent. Ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah. (RUU APBN-Th 2024)

Keuangan Negara dan Pendapatan Negara

Pajak merupakan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan antara individu dan negara dalam konteks keuangan publik. Djajadiningrat (2014) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban untuk mentransfer sebagian properti kepada negara, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, tanpa melanggar hukum atau bersifat kriminal. Dalam kerangka makroekonomi, kebijakan fiskal menjadi fokus dalam mengevaluasi dampak APBN terhadap perekonomian, termasuk efeknya terhadap kegiatan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan fiskal sendiri mencakup dua alat utama, yaitu kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan kebijakan belanja untuk mengatur pengeluaran pemerintah. Selain digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, kebijakan fiskal juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aspek sosial seperti kesetaraan, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Yossinomita dkk. (2024).

Pertumbuhan ekonomi dalam hal kebijakan fiskal dan moneter

Kebijakan fiskal, sebagai instrumen ekonomi, mengatur pendapatan dan belanja pemerintah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Subiyanto et al. (2020) menjelaskan bahwa fiskal bekerja dengan pajak dan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Fungsi kebijakan ini meliputi penetapan target anggaran, penyaluran pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Berbeda dengan kebijakan moneter, fiskal memanfaatkan belanja dan pajak untuk mengarahkan perekonomian. Perubahan dalam pajak dan belanja dapat mempengaruhi permintaan agregat, pola distribusi sumber daya, dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan suku bunga memengaruhi dinamika ekonomi suatu negara secara signifikan. Menurut Ogundipe et al. (2020), suku bunga merupakan komponen yang dikorbankan oleh kreditur dalam transaksi pinjaman. Suku bunga, menurut Susilawati & Putri D. Z (2019), adalah biaya yang harus ditunaikan dalam penukaran uang dalam periode waktu tertentu. Instrumen Kebijakan moneter ini memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang disoroti oleh Ningsih et al. (2023), yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi dapat meredam laju pembangunan ekonomi. Bank Sentral menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran. Saat pengangguran tinggi, suku bunga rendah digunakan untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, saat tingkat pengangguran rendah, kenaikan suku bunga dilakukan untuk mengurangi risiko inflasi. Penurunan suku bunga dianggap krusial dalam meningkatkan aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Nilai tukar atau kurs memainkan peran sentral dalam perekonomian terbuka, memberikan dampak besar pada variabel makroekonomi dan neraca transaksi internasional. Dalam konteks transaksi lintas negara, penentuan nilai tukar menjadi krusial saat suatu negara melakukan pembelian barang dari negara lain dengan mata uang yang berbeda. Sebagai contoh, ketika Indonesia bertransaksi dengan Amerika Serikat, dolar harus dibeli terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan ekonomi di sana. Kebijakan moneter dan fiskal, sebagai instrumen penting dalam pemerintahan, memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Sementara kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah pusat, kebijakan moneter diatur oleh bank sentral. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir fluktuasi ekonomi, namun kebijakan sektor aktual, khususnya dalam sektor komoditas seperti pertanian, pertambangan, dan industri, serta dalam jasa pariwisata internasional, juga turut serta dalam upaya stabilisasi ekonomi (Ridwan dan khsan, 2021).

Peran penting UMKM dalam perekonomian dan pertumbuhan UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun dalam kontribusi pajak. Namun, pertumbuhan UMKM di setiap provinsi di Indonesia terhambat oleh berbagai faktor seperti keterbatasan modal, manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan akses ke pasar ekspor. Rully Novie Wurarah (2019) menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM dengan memberikan insentif seperti tarif pajak yang lebih rendah di daerah dengan

sumber daya manusia dan modal yang memadai akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan literatur atau perpustakaan dari penelitian sebelumnya, dan bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, pada dasarnya, bukanlah prosedur statistik, melainkan studi tentang bagaimana subjek memahami dan menafsirkan makna dari peristiwa, interaksi, dan tindakan mereka dalam situasi tertentu, tergantung pada perspektif peneliti (Feny Rita Fiantika et al., 2022). Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, pendekatan tinjauan pustaka sistematis digunakan untuk mendefinisikan, mengevaluasi, dan menafsirkan semua temuan yang relevan tentang topik penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak dan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa jurnal, artikel, dan buku yang sesuai dengan penelitian ini yg didapat dari buku perpustakaan, buku digital dan Google Scholar. Sedangkan waktu pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Januari 2024

Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang digunakan untuk penelitian dan analisis, yang dapat berupa data kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Sumber data terbagi menjadi dua jenis utama: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti observasi, wawancara, survei, dan eksperimen, sehingga biasanya dianggap lebih akurat dan dapat diandalkan karena diambil langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder, di sisi lain, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, statistik resmi, dan situs web. Meskipun lebih mudah diakses dan lebih murah daripada data primer, data sekunder mungkin kurang akurat dan dapat diandalkan karena telah diproses atau ditafsirkan oleh pihak lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknologi pengumpulan data merupakan aspek penting dari penelitian, karena pemilihan metode yang tepat dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Data yang dihasilkan dari metode yang tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan

penelitian. Metode yang berbeda memberikan wawasan yang beragam, tergantung pada kebutuhan spesifik dan konteks penelitian. Beberapa teknologi pengumpulan data yang perlu diketahui oleh peneliti meliputi wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen. Wawancara adalah teknik di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi rinci mengenai subjek penelitian. Teknik ini sangat berguna untuk menggali pandangan pribadi, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang topik tertentu.

Selain wawancara, studi kasus merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap satu atau beberapa kasus untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan variabel-variabel yang kompleks, memberikan wawasan mendalam yang mungkin tidak bisa diperoleh melalui metode lain. Analisis dokumen, di sisi lain, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa laporan, artikel, catatan arsip, dan berbagai jenis dokumentasi lainnya. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh data historis dan kontekstual yang penting, serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber lain. Kombinasi berbagai metode ini sering kali digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang topik penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penerimaan dan belanja negara dalam Anggaran Belanja Pembangunan Nasional (APBN)

Penerimaan dan belanja negara diatur oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat perkiraan penerimaan dan belanja negara. APBN adalah dasar bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya guna mencapai tujuan negara, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Penerimaan negara yang tercantum dalam APBN terdiri dari beberapa kategori, yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar dan berasal dari kontribusi wajib masyarakat. Contoh pajak yang diterima pemerintah meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea cukai, dan lain-lain. Pajak ini sangat penting karena menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Selain pajak, ada juga penerimaan bukan pajak, yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, dan lainnya. Penerimaan bukan pajak pemerintah (PNBP) mencakup berbagai sektor, termasuk hasil penjualan minyak dan gas bumi, penerimaan dari industri pertambangan, serta pendapatan dari layanan publik seperti pembuatan dokumen identitas. Kategori terakhir adalah hibah, yang merupakan dana yang diterima pemerintah dari pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Hibah ini bisa berupa dana bantuan dari negara lain, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan mendukung program pembangunan tertentu di Indonesia.

Ketiga kategori penerimaan ini memainkan peran penting dalam memastikan pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan nasional. Penerimaan yang optimal dari setiap kategori ini juga membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang efektif dan transparan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan negara.

Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi pemerintahan. Pertama, pengeluaran barang dan jasa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah. Ini mencakup pembelian bahan baku, pemeliharaan peralatan, dan pemberian penghargaan kepada pegawai. Pengeluaran ini memastikan bahwa operasional sehari-hari pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. *Kedua*, belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan merupakan tulang punggung perekonomian yang memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan memperlancar mobilitas barang dan jasa. Investasi dalam infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. *Ketiga*, beban pegawai digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan sosial, dan hak-hak lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya. Pengeluaran ini penting untuk memastikan bahwa aparatur negara memiliki kesejahteraan yang memadai sehingga dapat bekerja dengan optimal dan profesional dalam melayani masyarakat. *Keempat*, beban bunga utang digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembayaran bunga utang ini penting untuk menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal negara di mata investor dan lembaga keuangan internasional. Pembayaran ini juga mencegah akumulasi utang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. *Kelima*, subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau organisasi komersial tertentu untuk mengurangi beban biaya. Subsidi ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi bahan bakar, pangan, dan energi, yang bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. *Keenam*, cadangan adalah dana yang dijamin untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Cadangan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas fiskal dalam menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

Penerimaan dan belanja negara merupakan dua unsur pokok dalam APBN. Pendapatan pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan penerimaan dan belanja negara dalam APBN dilakukan dengan berbagai undang-undang untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan negara yang efisien. Dengan demikian, APBN berfungsi sebagai instrumen utama dalam mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting yang digunakan oleh negara untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap aktivitas ekonomi. Implementasi kebijakan fiskal biasanya dilakukan melalui undang-undang yang mempengaruhi pemilihan anggaran dan pajak serta belanja pemerintah. Salah satu langkah utama dari kebijakan fiskal adalah untuk memastikan stabilitas perencanaan anggaran, memperkuat pembangunan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Di sisi lain, kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar melalui bank sentral, mengendalikan suku bunga, dan mengelola bagian keuangan lainnya. Salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menstabilkan nilai mata uang nasional. Ini dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan Indonesia tahun 2004, yang menetapkan bahwa bank sentral memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Selain itu, tanggung jawab pemerintah lokal dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik juga penting. Ini termasuk pengendalian penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dan pengelolaan belanja daerah secara efektif untuk melawan inflasi. Namun, pemisahan antara kebijakan moneter dan fiskal tidak selalu sederhana, karena adanya hubungan erat antara suku bunga dan kebijakan moneter. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua otoritas guna merumuskan kebijakan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Perpajakan dan Pengeluaran Sebagai Bagian dari Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan perekonomian negara. Kebijakan fiskal, yang mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, bertujuan untuk mengontrol volume uang dan suku bunga guna mencapai keseimbangan internal dan eksternal ekonomi. Dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan inflasi yang rendah, kebijakan moneter berusaha mencapai keseimbangan internal, sementara keseimbangan eksternal ditujukan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran.

Implementasi kebijakan fiskal melibatkan berbagai tindakan, seperti defisit anggaran ketika belanja melebihi pendapatan, yang dilakukan dengan mengurangi pajak dan meningkatkan belanja. Di sisi lain, surplus anggaran terjadi saat pendapatan melebihi belanja, memicu kenaikan pajak dan pengurangan pengeluaran. Pajak, sebagai sumber penerimaan utama negara selain pendapatan migas, adalah instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Pembaruan dan reformasi perpajakan secara berkala

dilakukan oleh pemerintah untuk memperbarui kebijakan perpajakan sesuai dengan tren masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

Kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya memengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan stabilitas dalam total permintaan dan produktivitas, serta menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan Pemerintah pusat terkait APBN 2014 merupakan langkah konkret dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah, langkah-langkah pemerintah pusat dalam penyusunan APBN memegang peranan penting dalam mencapai tujuan ini.

Penyusunan undang-undang perpajakan yang berfokus pada manfaat ekonomi melalui penerimaan pajak merupakan langkah strategis lain yang dilakukan pemerintah. Melalui peningkatan kewajaran, beban yang adil, dan peningkatan kepatuhan perpajakan, pemerintah berupaya memperkuat administrasi perpajakan dengan memberikan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang unggul kepada wajib pajak umum untuk meningkatkan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

Implementasi peraturan perundang-undangan dalam kebijakan fiskal dan moneter berdampak pada pemilihan anggaran, pengaturan pajak, dan pengendalian jumlah uang beredar serta suku bunga. Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter untuk mengelola variabel-variabel tersebut dalam masyarakat. Dengan tujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan stabilitas anggaran negara, kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stabilitas suku bunga dan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari kebijakan moneter

Kestabilan nilai tukar rupiah dan suku bunga memiliki peran krusial dalam kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Indonesia (BI). Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menggunakan berbagai alat kebijakan, di antaranya adalah pengaturan suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing. Peran suku bunga sangat signifikan dalam memengaruhi permintaan agregat dengan menekan daya beli masyarakat dan investasi. Dengan menurunkan suku bunga, BI dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, suku bunga yang rendah juga dapat menarik investasi asing ke Indonesia, yang pada gilirannya akan menguatkan nilai tukar Rupiah.

Intervensi di pasar valuta asing juga menjadi strategi penting bagi BI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan membeli dan menjual Rupiah di pasar valuta asing, BI dapat mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menjaga kepercayaan investor terhadap mata uang domestik. Kestabilan suku bunga dan nilai tukar rupiah menjadi landasan penting dalam kebijakan moneter BI untuk mencapai stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga BI akan terus memantau kondisi ekonomi dan pasar keuangan untuk menyesuaikan kebijakan moneter yang sesuai.

Kendala Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

Apa yang kita ketahui adalah bahwa Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah belum efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Misalnya, jika inflasi atau kenaikan harga menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan, pemerintah biasanya mengambil kebijakan moneter atau penerapan kebijakan moneter yang ketat atau uang yang ketat untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak. Ini tidak efektif dan perlu Dipisahkan antara kebijakan moneter dan fiskal. Ketidakefektifan kebijakan yang diadopsi juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi situasi ekonomi di negara tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, penulis menganggap minimnya akses sektor UMKM terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia sebagai salah satu hambatan utama dalam penerapan kebijakan yang efektif, yang pada gilirannya menjadi penghambat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. dan menciptakan lapangan kerja.

Pembatasan yang terkait dengan munculnya kesenjangan akses di sektor UMKM dapat merugikan potensi pertumbuhan dan kontribusi ekonomi dari sektor tersebut. Salah satu kendala utama adalah akses permodalan yang terbatas, di mana UMKM sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Persyaratan yang rumit, agunan yang tidak memadai, dan riwayat kredit yang minim menjadi beberapa faktor utama yang menghambat UMKM dalam mengakses dana. Selain itu, kurangnya informasi dan edukasi mengenai skema pembiayaan alternatif juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Selain kendala permodalan, ketidakjelasan dalam regulasi dan proses perizinan usaha juga menjadi hambatan bagi UMKM. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu menyulitkan UMKM untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Kurangnya kepastian hukum dan regulasi yang tidak berpihak pada UMKM juga menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, sehingga membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang.

Kurangnya infrastruktur pendukung juga menjadi kendala serius bagi UMKM. Akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti internet, jalan, dan listrik dapat menghambat operasional dan pengembangan bisnis UMKM. Selain itu, kekurangan infrastruktur penunjang seperti pusat logistik dan gudang penyimpanan yang memadai juga menjadi kendala dalam skala operasional UMKM. Semua kendala ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan dukungan bagi UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain kendala akses terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia, minimnya edukasi masyarakat dan literasi keuangan menjadi tantangan utama dalam menyampaikan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) ke sektor riil. Kurangnya pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan memperlambat reaksi pasar terhadap perubahan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya, mengurangi efektivitas BI dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dan literasi keuangan dianggap kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implikasi kebijakan moneter BI. Masyarakat yang teredukasi secara finansial akan lebih mampu memahami dan merespons perubahan kebijakan moneter BI dengan lebih cepat dan tepat. Kesadaran akan dampak perubahan suku bunga terhadap ekonomi secara keseluruhan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat guna memperkuat responsivitas terhadap kebijakan moneter dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan upaya lebih untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan fiskal merupakan alat penting dalam mengelola perekonomian, dengan penerapan yang tepat dapat menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tujuan utama kebijakan moneter adalah stabilitas nilai tukar rupiah, yang merupakan bagian dari upaya mengatasi kesulitan ekonomi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun undang-undang APBN mengatur kebijakan fiskal melalui penerimaan dan pengeluaran, penerapan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Indonesia menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Namun, kendala seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan bank sentral serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas keuangan masih perlu diatasi untuk mencapai kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajadiningrat., 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Feny Rita Fiantika et al., 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi
- Ika Fahrika et al., 2023. Realita Penerapan Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia Dan Permasalahannya. *Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi*, Volume 15 Nomor 2.
- Lathifah Hanim, Noorman, 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unisula Press
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode (2014-2016). *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 20 (2), 96–103.

- Ningsih, L., et al., 2023. Efektivitas Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*. 2 (2), 121-240.
- Ogundipe, Adeyemi A., Akintola, D. A. F., & Olaoye, D. S. A. (2020). Interest Rates and Loan Performance of Deposit Money Banks In Nigeria. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, 8(1).
- Subiyanto et al., 2020. Modul Pembelajaran Ekonomi Kebijakan Fiskal, APBN, APBD dan Perpajakan, Madrasah reform.
- Susilawati, & Putri, D. Z. (2019). Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 667–678.
- Sri Astuty et al., 2023. *Ekonomi Monoter*, Tahta Media Group.
- Ridwan, Ihsan Suciawan Nawir, 2021. *Buku Ekonomi Publik*, Pustaka Pelajar.
- Rully Novie Wurarah, 2019. *Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*.
- Tri Wahyu Yuliani, et al., 2024. Interaksi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Economics & Education Journal* Volume 6, Nomor 1, April 2024
- Yossinomita, Haryadi, Saidin Nainggolan, dan Zulfanetti., 2024, *Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan*, Haura Utama.